

LAPORAN

INSTANSI

KINERJA



2023 KECAMATAN
NUHA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Geografis	2
1.2 Data Umum Organisasi	3
1.3. Struktur/Kondisi Organisasi	6
1.4. Peran Organisasi.....	7
1.5. Isu Strategis.....	7
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA.....	9
BAB III.....	21
AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian IKU Tahun 2023	21
Sasaran 1. Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha	22
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	22
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir	24
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	25
4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	27
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	27
Sasaran 2. Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha	35
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2023.....	36
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir	36
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	38

4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	38
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	39
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	39
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	39
BAB IV.....	54
PENUTUP.....	54
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	3
Tabel 1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan.....	4
Tabel 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan.....	4
Tabel 1.4 Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian.....	5
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	12
Tabel 2.2 APBD Perubahan Tahun 2023	13
Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini.....	17
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	19
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah.....	21
Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini.....	29
Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	30
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah (Renstra 2016-2021....	32
Tabel 3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	33
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	41

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur serta Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Nuha dapat kami selesaikan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Hal yang paling utama dalam penyusunan LAKIP ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Kecamatan Nuha sebagai sarana umpan balik untuk selalu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyampaian isi materi maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kami tidak menutup diri untuk menerima perbaikan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga LAKIP Kecamatan Nuha Tahun 2023 ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Nuha, Januari 2024



CAMAT NUHA

HARIYADI HAMID, S.STP

NIP. 19850710 200602 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Nuha selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang diharapkan dengan realisasi yang terjadi. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak

hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Tentu harapan tersebut perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel di Kecamatan Nuha diperlukan penerapan *good governance*. Dimana terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi, Kecamatan Nuha menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dicita-citakan yang mempunyai pilar-pilar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

1.1 Kondisi Geografis

Luas wilayah Kecamatan Nuha 808,27 km² atau sekitar 100.00 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Nuha terdiri dari 4 (duabelas) Desa definitif dan 1 (satu) Kelurahan, dengan 12 dusun/lingkungan dan 37 RT. Adapun Desa/Kelurahan dimaksud masing-masing :

1. Kelurahan Magani
2. Desa Sorowako
3. Desa Nikkel
4. Desa Nuha
5. Desa Matano

Jumlah Penduduk Kecamatan Nuha pada tahun 2023 sebanyak 23.973 jiwa (Laporan Penduduk Per Desember 2023) dengan rincian : laki-laki sebanyak 12.405 jiwa dan perempuan sebanyak 11.568 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 6.402 KK. Penduduk Kecamatan Nuha merupakan penduduk yang heterogen baik suku maupun agama. Adapun Suku dan Agama di Kecamatan Nuha yaitu Suku Jawa, Bali, Batak, Bugis, Toraja, dan Agama Islam, Kristen dan Hindu.

1.2 Data Umum Organisasi

Secara keseluruhan keadaan dan jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Nuha dan Kantor Kelurahan Nuha per tanggal 31 Desember 2023 adalah 21 (Dua Puluh satu) orang PNS dan 10 (Sepuluh) orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Golongan IV	1	1	-	-	2
2	Golongan III	3	5	3	6	17
3	Golongan II	-	-	-	2	2
4	Golongan I	-	-	-	-	-
JUMLAH		4	6	3	8	21

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1/D4	D2/D3	SMA/SMP	
1	Golongan IV	-	1	-	-	1
2	Golongan III	-	15	2	1	18
3	Golongan II	-	-	-	2	2
4	Golongan I	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	16	2	3	21

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

3. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	ESELON				JUMLAH
		II.B	III.A/B	IV.A/B	NON ESELON	
1	Struktural	-	2	10	9	21
2	Fungsional	-	-	-	-	-
3	Fungsional Umum	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	2	10	9	21

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

4. Berdasarkan Status Kepegawaian

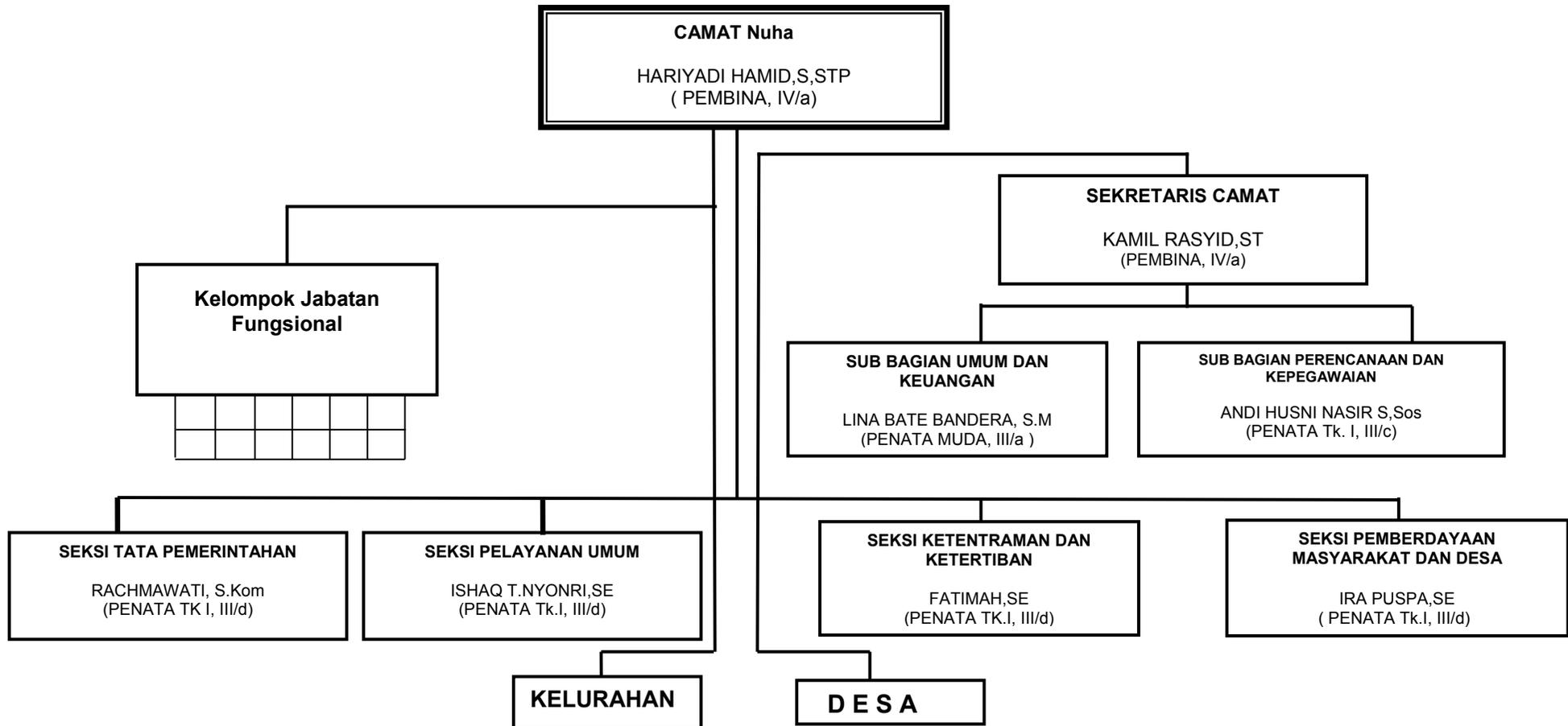
Tabel 1.4
Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS KEPEGAWAIN	JUMLAH
1	PNS	21
2	CPNS	-
3	PTT	-
4	UPAH JASA	10
JUMLAH		31

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

1.3. Struktur/Kondisi Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN NUHA



1.4. Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.5. Isu Strategis

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Nuha tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kecamatan Nuha yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

Memperhatikan isu-isu yang dipermasalahkan diatas terkait pelayanan kepada masyarakat,diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Renstra SKPD adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, yang akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja Program, Strategi Pembangunan, Kebijakan, Program dan Sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Rencana Strategis Kecamatan Nuha Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang

berkesinambungan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026), yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
2. Menyediakan pedoman dan landasan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi perangkat kecamatan dan kelurahan secara terfokus dan berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Menyediakan instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja Kecamatan Nuha.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk :

1. Menciptakan keterpaduan langkah bagi seluruh unit kerja yang ada dalam melaksanakan tugas serta kegiatan yang telah disepakati.
2. Meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui kesungguhan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

❖ **Visi dan Misi**

Pada dasarnya, rencana Strategis (Renstra) OPD harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur, agar pencapaian tujuan dalam pembangunan daerah terdapat sinkronisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Visi dan Misi Kecamatan Nuha sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah :

**“Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan
Nilai Agama dan Budaya”**

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi-Misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kecamatan Nuha menyusun Perjanjian Kinerja mengacu pada Dokumen Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2021-2026. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Dokumen Renja Tahun 2023 dan DPA Tahun Anggaran 2023. Kecamatan Nuha telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Camat Nuha Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan (%)	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.685.345.777	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 9.547.400	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 343.836.980	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 15.404.493	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 34.217.900	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 12.298.700	APBD

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Tabel 2.2
APBD Perubahan Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU
Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	9,587,400
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	9,587,400
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	40 lembar	9,587,400
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	343,836,980
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	139,235,480
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	25%	16,491,300
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	35 orang	122,744,180
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	204,601,500
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Kegiatan	204,601,500
	Program Koordinasi dan Ketertiban Umum	100%	15,404,493
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	100%	12,596,000

Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 kali	7,575,900
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Kali	5,021,100
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	2,808,493
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Kali	2,808,493
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	18,158,900
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	34,217,900
Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	100%	34,217,900
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	12,298,700
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	12,298,700

	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	3,044,500
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan di Kecamatan	4 dokumen	9,254,200
Meningkatnya Capaian kinerja dan keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	3,685,345,777
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	50,743,750
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	16,055,700
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	12,020,650
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 dokumen	2,650,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	20,017,400
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,895,245,677
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	21 Orang	2,437,591,432
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4Dokumen	24,960,000

	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	19,363,800
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Dokumen	19,363,800
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	-
	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	4 Dokumen	-
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	92,759,000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Laporan	15,509,000
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	77,250,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	673,671,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Unit	6,870,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	2,997,500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15 Orang	10,463,900
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 jenis	21,000,600
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Exp	11,500,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6000 ktk	264,030,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Kali	356,809,000

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	81,500,000
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	9 unit	81,500,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	476,943,220
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Surat	28,255,375
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Rek	40,488,992
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32 Orang	207,000,000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	166,684,500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	53,080,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4Unit	14,410,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	14,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	4 unit	10,000,000
JUMLAH	100%	4,100,691,250

Sumber : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nuha

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang

digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun IKU Pemerintah Kecamatan Nuha yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 – 2026 KANTOR KEC. NUHA

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	$IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi perUnsur}}{\text{Total Unsur Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Kuesioner	Seksi Pemerintaha, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Seksi Pelayanan Umum
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha	Nilai Lakip	Nilai	Hasil Penilaian Inspektorat	Laporan Kegiatan	Seksi Pemerintaha, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pelayanan Umum, Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian, dan Subbagian Umum dan Keuangan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Transisi 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha	Persentase Peningkatan Nilai IKM (%)	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Nuha		NA	0.12	0.31	0.31	0.31	0.30
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,9	81	81,25	81,5	81,75	82
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kecamatan Nuha	Nilai LAKIP Kecamatan Nuha (nilai)	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha		63	64	65	66	67	65
				Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan pemerintahan yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka sebagai wujud tanggungjawab, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel III-1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1. Capaian IKU Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja

kegiatan berdasarkan kelompok input, proses, output, outcome, benefit dan impact, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Pencapaian terhadap IKU Kantor Kecamatan Nuha akan digambarkan per Sasaran Strategis, sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"**, dan tujuan **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"**. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Nuha sebagai leading sector pelaksanaan pelayanan public di tingkat kecamatan.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Predikat
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.25	80.62	99.22 %	Sangat Tinggi

Sumber :Seksi Pelayanan Umum

Rumus : % Capaian Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

a. Analisis Capaian kinerja sasaran pertama sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat persentase capaian mencapai 99.62% dari target yang direncanakan. Ini berarti hasil yang dicapai sudah baik. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan maupun non perizinan Tahun 2023 Kecamatan Nuha berdasarkan 14 (Empat belas) pertanyaan sesuai peraturan Menpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan menggunakan kuesioner yang mengajukan permohonan pelayanan yang dibagikan pada setiap pengunjung yang datang pada loket pelayanan Kecamatan Nuha, termasuk juga kuesioner indikator responden yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menunjukkan realisasi baik dari target 81.25 atau melampaui target dengan nilai survei 99.22% (daftar terlampir). Sasaran pertama yaitu meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kecamatan Nuha.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai terendah sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut maka diambil kesimpulan :

1) Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan adalah unsur Kompetensi keawajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan dengan nilai nilai **317**.

❖ **Faktor penghambat**, kecamatan Nuha pada unsur kompetensi pelaksana mendapatkan nilai paling rendah pada penilaian IKM disebabkan karena jumlah personil yang masih kurang dan kompetensi sumber daya manusia

yang di nilai masih kurang. Sebab msaih di temukan pegawai di kantor kecamatan Nuha yang belum memahami dengan baik terkait segala macam prosedur pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, ahli waris, akta jual beli dan lain sebagainya.

❖ **Solusi** untuk permasalahan unsur kompetensi pelaksana adalah dengan memberikan pemahaman kepada para pegawai kantor kecamatan Nuha terkait persyaratan dan prosedur pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, ahli waris dan jenis pelayanan lain. sehingga tidak ada lagi pegawai kantor kecamatan yang tidak memahami prosedur pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di kecamatan.

2) Nilai kelompok yang paling tinggi yang harus dipertahankan pada unsur ketepatan jadwal waktu pelayanan dengan nilai **330**

❖ **Faktor pendukung** Kecamatan Nuha pada unsur dalam pelayanan mendapat nilai tinggi, disebabkan karena kantor kecamatan Nuha telah berusaha memaksimalkan jadwal waktu pelayanan kepada masyarakat.

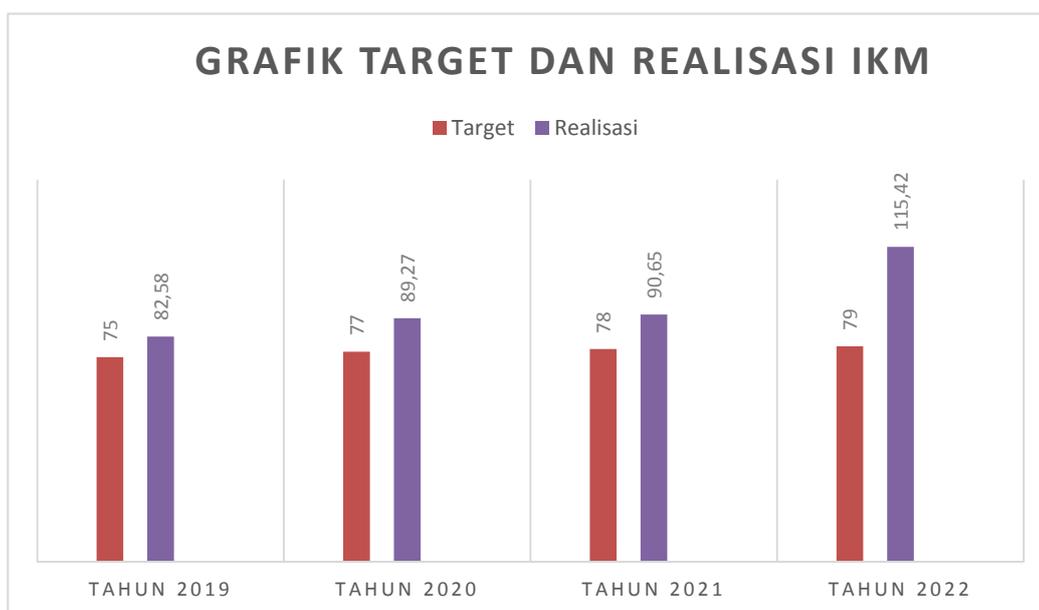
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Predikat
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	2020	98.5	92.54	Sedang
2		2021	80.09	80.03	Tinggi
3		2022	81	80.05	Tinggi
4		2023	81,25	99,22	Tinggi

Sumber : Seksi Pelayanan Umum



Berdasarkan grafik diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan Tahun 2023. Pada setiap tahunnya realisasi Survei Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dan melampaui target yang telah ditentukan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan 2023 Terhadap Target Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	RENSTRA
			2023	2023	
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.25	80.62	82

Sumber : Seksi Pelayanan Umum

Dengan melihat table capaian diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi hingga tahun 2023 sebesar 80,62 atau setara dengan 99,22% dengan Predikat Sangat Tinggi, Target nilai IKM pada akhir periode Resntra 2021-2026 yaitu 82, jika Realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan target IKM akhir periode Renstra, maka persentase capaian IKM sampai dengan tahun 2023 adalah 98,32%. Target ditahun 2024 memiliki peluang yang besar untuk dapat tercapai. Terkait indikator tersebut, diharapkan Kantor Kecamatan Nuha untuk lebih meningkatkan segala aspek yang mendukung terwujudnya indikator tersebut seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber anggaran, sehingga nantinya sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Nuha dapat terwujud.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja yang telah dilakukan.

Adapun hal yang mempengaruhi peningkatan kinerja yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat yaitu :

- a. Tidak semua pegawai di kantor kecamatan Nuha memahami tentang syarat dan prosedur pelayanan (dokumen kependudukan, perizinan, ahli waris, pengoperan hak tanah, akta jual beli dan yang lainnya).

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya sarana dan sumber daya manusia dalam menyampaikan informasi tentang syarat dan ketentuan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan Nuha dapat terfasilitasi dengan adanya papan informasi, brosur dan banner yang ditempatkan ruang pelayanan di kecamatan dan desa/kelurahan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait syarat dan ketentuan pengurusan pelayanan perizinan dan non perizinan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu:

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Pada tahun 2021 kegiatan perizinan hanya dilakukan sampai dengan bulan Juli, sejak tanggal 2 Agustus 2021 tidak ada lagi pelaksanaan perizinan di Kecamatan, menunggu peraturan yang baru terkait pelaksanaan perizinan, untuk sementara pelaksanaan perizinan seperti IMB dan yang lainnya diambil alih oleh kabupaten.

❖ **Hambatan** : Belum ada peraturan yang baru terkait pelaksanaan pelayanan perizinan di kecamatan.

❖ **Solusi** : Tetap memberikan informasi/sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan yang terbaru.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat

1) Koordinasi kegiatan pemberdayaan

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Target pada sub kegiatan ini adalah persentase keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan musrenbang mencapai 40% atau sebanding dengan 160%. Musrenbang Kecamatan Nuha dilaksanakan pada Bulan Maret 2023, masing-masing Desa/Kelurahan mengusulkan sebanyak 2 kegiatan prioritas dengan total 10 usulan. Setelah dilakukan musyawarah dan verifikasi oleh BAPPEDA, usulan yang terealisasi pada tahun 2023 sebanyak 3 kegiatan prioritas.

- ❖ **Hambatan** : Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam menyampaikan usulan dalam musrenbang.
 - ❖ **Solusi** : Memberikan pemahaman kepada tokoh perempuan terkait pelaksanaan musrenbang.
- b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan PKK pada 4 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Nuha. Kegiatan PKK untuk tingkat Kecamatan yaitu :

- a) Memfasilitasi administrasi PKK Desa/Kelurahan;
- b) Memfasilitasi Program / Kegiatan PKK Desa/Kelurahan;
- c) Pendampingan kegiatan pemberdayaan yang dibina oleh PKK Desa/Kelurahan.

Sepanjang tahun 2023 PKK kecamatan Nuha melakukan beberapa kegiatan diantaranya Lomba Dasawisma, Lomba Posyandu terintegrasi dan lomba senam lansia. Kegiatan PKK pada tahun 2023 sebagian besar berkaitan dengan penertiban administrasi PKK Desa/Kelurahan dan beberapa perlombaan baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten.

- ❖ **Hambatan** : Sumber Daya Manusia terbatas.
- ❖ **Solusi** :Melakukan bimbingan teknis bagi pengurus PKK untuk peningkatan Kapsitas Sumber Daya Manusia.

2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Target dalam sub kegiatan ini adalah jumlah kegiatan yang memberdayakan masyarakat. Merekrut anggota

linmas merupakan salah satu bentuk memberdayakan masyarakat di kelurahan Nuha.

- ❖ **Hambatan** : belum ada data berkaitan dengan kelompok masyarakat yang bisa di berdayakan di kelurahan Nuha.
- ❖ **Solusi** : membentuk dan mendata kelompok-kelompok masyarakat untuk dapat mempermudah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Nuha.

C. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Target pada sub kegiatan ini adalah persentase Upaya penyelesaian kasus penyelenggaraan kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial lainnya yang di fasilitasi. Sepanjang tahun 2023 tidak ada kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban yang di selesaikan sampai di tingkat kecamatan, artinya persoalan ataupun sengketa di masyarakat mampu di selesaikan sampai pada tingkat desa.

- ❖ **Hambatan** : Pemerintah desa tidak pernah mengirimkan laporan ke kecamatan terkait kasus-kasus atau sengketa yang telah di selesaikan di tingkat Desa/Kelurahan ataupun laporan terkait kasus/sengketa yang harus di bawa sampai di tingkat kecamatan.
- ❖ **Solusi** : menyampaikan pada pemerintah desa untuk selalu menyampaikan kepada kecamatan (melalui

persuratan) apabila ada kasus-sengketa yang telah di selesaikan di tingkat Desa/Kelurahan. Ataupun kasus yang harus di bawa sampai ke tingkat kecamatan.

b. Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Masyarakat

Target pada sub kegiatan ini adalah jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan. Sepanjang tahun 2023 pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan. Pertemuan sering dilaksanakan ketika memasuki puasa, tahun baru ataupun hari-hari besar yang lain. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran keamanan dan ketertiban di masyarakat.

❖ **Hambatan** : Pada umumnya tidak ada hambatan yang berarti pada pelaksanaan sub kegiatan ini. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban yang terjadi di kecamatan Nuha selama tahun 2022.

❖ **Solusi** : Tetap berusaha menjaga keamanan dan ketertiban di kecamatan Nuha dengan melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran keamanan dan ketertiban seperti melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.

2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Target pada sub kegiatan ini adalah Jumlah koordinasi/sinergitas dengan polri dan/atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan.

- ❖ **Hambatan** : kurangnya informasi apabila ada peraturan baru yang diterbitkan. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui apabila ada aturan baru yang harus di patuhi.
- ❖ **Solusi** : Lebih aktif dalam mencari informasi berkaitan dengan aturan-aturan baru yang harus di sosialisasikan kepada masyarakat.

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Target yang ingin dicapai dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) adalah semua rekomendasi yang masuk dikecamatan 100% harus diselesaikan. Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimka dilakukan apabila terdapat persoalan yang harus dibahas oleh lintas sektor se-Kecamatan Nuha. Berikut adalah beberapa hal yang dibahas dalam rapat Forkopimka Tahun 2023 :

- a) Pertemuan dengan beberapa lintas sektor terkait penanganan sampah dilingkungan Kecamatan Nuha.
- b) Rapat koordinasi berkaitan dengan persiapan pelaksanaan shalat Idul Fitri di Kecamatan Nuha.
- c) Persiapan HUT Republik Indonesia ke 76 di kecamatan Nuha

- ❖ **Hambatan** : Sinergitas antara FORKOPIMKA, pemerintah desa/kelurahan dan unit kerja lingkup Kecamatan Nuha belum maksimal.
- ❖ **Solusi:** Lebih meningkatkan koordinasi antara sesama unsur-unsur terkait.

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi, rekomendasi dan koordianasi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Target dalam sub kegiatan ini adalah terbentuknya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sehingga APBDes dapat dicairkan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 4 Rancangan Peraturan Desa dan 4 Rancangan Peraturan Kepala Desa dengan total 8 Peraturan yang dibuat oleh Desa sebelum memasuki tahun anggaran 2023, Rancangan Peraturan tersebut kemudian diverifikasi oleh Tim Fasilitasi dan Evaluasi kecamatan lalu dibuatkan surat pengantar untuk dapat di teruskan dan diverifikasi kembali oleh Dinas PMD, setelah diverifikasi, Rancangan Peraturan tersebut kemudian disahkan sebagai Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, sebelum APBDes dicairkan, Desa mengajukan Peraturan yang telah dibuat kepada Camat Nuha untuk mendapatkan rekomendasi pencairan APBDes.

Pada pertengahan tahun berjalan akan terjadi perubahan anggaran sehingga desa akan membuat 4 Peraturan Desa (Perubahan) dan 4 Peraturan Kepala Desa (Perubahan). Sehingga total Peraturan terkait APBDes yang dibuat oleh desa selama 1 (satu) tahun adalah sebanyak 16 Peraturan. Pencairan APBDes

dilakukan dalam 2 (dua) tahap selama 1 (satu) tahun anggaran.

❖ **Hambatan :**

- a) Keterlambatan Informasi terkait aturan penyusunan APBDes.
- b) Peraturan Bupati terkait pagu indikatif terlambat ditetapkan.
- c) Belum adanya peningkatan kapasitas SDM di kecamatan terkait kegiatan perencanaan desa.

❖ **Solusi :**

- a) Melakukan konsultasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait.
 - b) Menggunakan estimasi anggaran tahun sebelumnya.
 - c) Pengusulan kegiatan bimbingan teknis perencanaan APBDes kepada SKPD terkait.
- b. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan

Target dari subkegiatan ini adalah jumlah kawasan pedesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya. Kegiatan ini dilaksanakan bertahap dalam IV (empat) triwulan, dimana pada setiap triwulan akan menghasilkan 1 (satu) dokumen hasil monitoring dan evaluasi. Sehingga secara keseluruhan, dalam 1 (tahun) kegiatan ini akan menghasilkan 4 dokumen hasil monitoring dan evaluasi bagi desa yang mendapatkan dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus).

❖ **Hambatan :**

- a) Dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) merupakan hal yang baru di Kabupaten Luwu Timur sehingga masih di perlukan persamaan persepsi antara

Desa, Kecamatan dan stakeholder yang terlibat di dalam kegiatan ini.

- b) Aturan terkait pelaksanaan BKK terlambat di publikasikan, sehingga desa dan kecamatan yang secara teknis melaksanakan kegiatan mengalami beberapa kesulitan.

❖ **Solusi:**

- a) Menyatukan persepsi antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
- b) Secara aktif mencari informasi terkait aturan-aturan teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Sasaran 2. Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"**, dan tujuan **"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan"**. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Nuha, kaitannya dengan Pelaksanaan Tata Pemerintahan dilingkup kecamatan.

Sebagai catatan untuk Nilai SAKIP sampai saat laporan ini disusun, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur belum mengeluarkan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2023, sehubungan hal tersebut maka pengukuran capaian Indikator Kinerja ini masih mengacu pada capaian tahun sebelumnya sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Adapun perbandingan antara target dan realisasi pada tahun 2022 dan tahun 2023 terkait sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022 :**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Kecamatan Nuha	Nilai LAKIP	65	66	58,40 (CC)	-	89.84	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

a. Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas, maka untuk tahun 2023 dapat dilihat persentase capaian kinerja sasaran 2 (dua) karena masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan untuk tahun 2022 nilai LAKIP Kecamatan Nuha adalah 58,40 (CC) dari target 65, ini berarti bahwa hasil yang dicapai belum maksimal, karena belum mencapai target yang telah ditentukan, oleh sebab itu, masih diperlukan banyak perbaikan untuk dapat mencapai target pada tahun 2023.

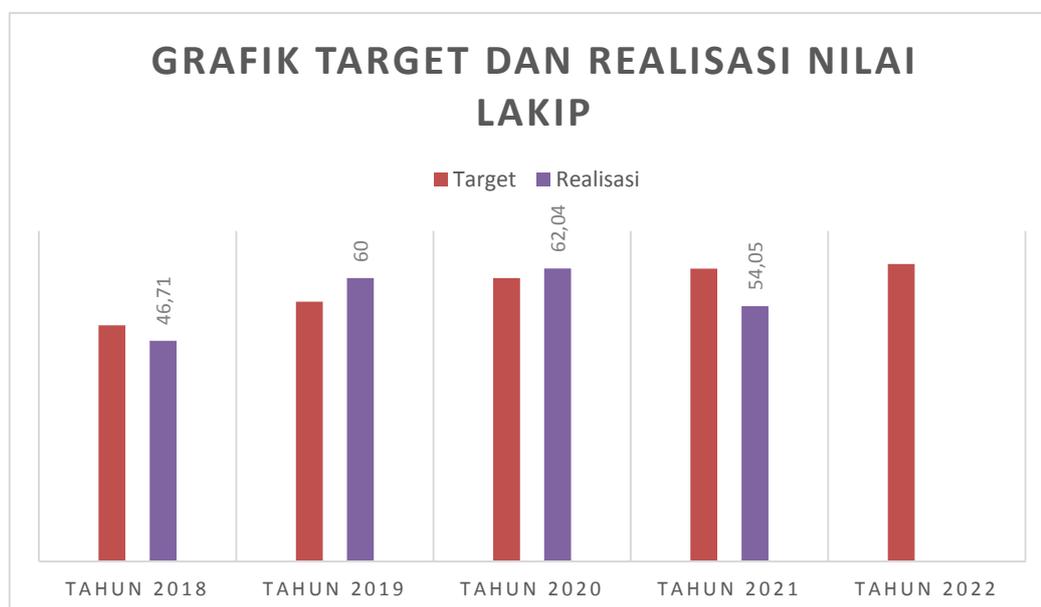
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun
Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Predikat
1	Nilai Score LAKIP (n-1)	2019	59	60.02,	101	
		2020	63	60,02	95.27	
2		2021	64	64,52	100.82	
3		2022	65	58,40	89.84	
4		2023	66	-	-	

Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian



Berdasarkan grafik di atas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2019 sampai tahun 2023 bahwa pada tahun 2019 Nilai Skor LAKIP yang diperoleh 60,02 dengan kategori B. pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan memperoleh nilai 60,02 dengan kategori B. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai 64.52 dengan Kategori B, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan memperoleh nilai 58,40 namun dengan kategori CC. sehingga dapat disimpulkan, perolehan nilai LAKIP kantor Kecamatan Nuha secara umum mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Namun pada tahun 2022

harus dilakukan upaya-upaya agar dapat meningkatkan kembali nilai Lakip di tahun selanjutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah (Renstra 2021-2026)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	RENSTRA
			2022		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Nuha	Nilai Score LAKIP (n-1)	64	58,40	67

Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu Skor LAKIP 58,40 dengan kategori CC. Nilai SAKIP yang diraih Tahun 2022 ini menunjukkan trend yang kurang positif dimana menurun dari tahun sebelumnya.

4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

- 1) Ada beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan capaian indikator tersebut yaitu
 - a. Kurangnya evaluasi kinerja internal yang dilakukan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	Jabatan	Hasil Analisis Jabatan		Kondisi saat ini		
		Struktural	Pelaksana	Struktural	Pelaksana	
					PNS	Non PNS
1	Camat	1	-	1	-	-
2	Sekretaris Camat	1	-	1	-	-
3	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	1	4	1	-	1
4	Kasubag Umum dan Keuangan	1	5	1	3	2
5	Kasi Pemerintahan Umum	1	4	1	-	-
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	4	1	1	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1	4	1	1	-
8	Kasi Pelayanan Umum	1	4	1	1	-
JUMLAH		8	25	8	6	4
TOTAL		33		20		

Sumber : Dokumen ANJAB dan ABK

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah dan syarat pemangku jabatan pelaksana pada Kantor Kecamatan Nuha belum sesuai dengan hasil analisis jabatan Kecamatan Nuha yang dibuat oleh Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Luwu Timur karena sebagian jabatan pelaksana masih diisi oleh Non PNS (tenaga upah jasa).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Nuha adalah :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen perencanaan yang disusun oleh Kantor kecamatan Nuha, diantaranya adalah Renja Pokok dan Renja Perubahan.

❖ **Hambatan :**

- a) Keterbatasan data dan informasi dari masing-masing sub bagian dan kepala seksi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan sehingga seringkali penyusunan dokumen perencanaan mengalami keterlambatan.
- b) Kurangnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan.

❖ **Solusi:**

- a) Lebih meningkatkan koordinasi antara sesama unsur-unsur terkait dalam hal ini masing-masing Seksi dan Sub Bagian.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen RKA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen RKA-SKPD yang disusun oleh Kantor kecamatan Nuha, diantaranya adalah RKA-SKPD Pokok dan RKA-SKPD Perubahan.

c. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen DPA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen DPA-SKPD yang disusun oleh Kantor kecamatan Nuha, diantaranya adalah DPA-SKPD Pokok dan DPA-SKPD Perubahan.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- ❖ **Hambatan/Kendala** : Keterlambatan pengumpulan data untuk bahan LAKIP dari Kepala Seksi.
 - ❖ **Solusi** : Menekankan kepada kepala seksi untuk segera menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Target dalam sub kegiatan ini adalah terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN di kantor kecamatan Nuha sebanyak 23 orang (dengan kelurahan). Tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini di kantor Kecamatan Nuha.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah
- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Target dari sub kegiatan ini adalah barang yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja di kantor kecamatan Nuha dilaksanakan dengan persentase 100%.
- ❖ **Hambatan/Kendala**
- Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :
- a) Pengurus barang belum maksimal dalam menyediakan sebagian kebutuhan kantor (ATK).
 - b) Inventarisasi barang milik daerah masih belum maksimal.
- ❖ **Solusi**
- Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :
- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.

- b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- ❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, untuk pemungutan retribusi pasar, Hotel dan rumah makan sudah tidak dilakukan di Kecamatan Nuha sudah dialihkan ke dinas terkait
 - ❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

 - a. Tetap memberikan informasi/sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan yang terbaru.
- 5) Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah
- a. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - ❖ **Hambatan/Kendala** : kurangnya anggaran dalam pelaksanaan bimtek sehingga terdapat ASN yang tidak bisa di fasilitasi untuk mengikuti bimtek.
 - ❖ **Solusi** : menambahkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan bimtek di perubahan anggaran dan di anggaran pokok tahun 2024.
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
 - b. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - c. Penyediaan bahan logistic kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- f. Fasilitasi kunjungan tamu;
- g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang dan ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
- b) Keterbatasan Anggaran.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
- b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang dan ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
- c) Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder.
- d) Memaksimalkan anggaran yang telah di sediakan.

- ❖ Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan dan staf.

7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Pengurus barang belum maksimal dalam menyediakan sebagian kebutuhan kantor (ATK).

- b) Inventarisasi barang milik daerah masih belum maksimal.
- c) Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan.
- d) Terlambatnya penginputan melalui Aplikasi pengadaan barang dan jasa.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
 - b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
 - c) Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.
 - d) Melakukan percepatan penginputan proses pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi.
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Inventarisasi barang milik daerah masih belum maksimal.
- b) Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
 - b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
 - c) Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
 - b) Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.
- ❖ Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu pada umumnya kegiatan yang

apa pada program Penunjang Urusan Permerintah Daerah berjalan dengan baik.

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran APBD untuk Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 adalah sebesar Rp.4,100,691,250,- . Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp.3,852,584,544,- dengan capaian 93,95%. Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET TRIWULAN I, II, III, IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2023	Capaian (%)
			(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
				(6/5*100)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	4,699,995,397	4,569,286,783	97,22%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,961,500	9,820,400	98.58%
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,055,700	15,724,520	97,93%
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12,020,650	11,924,280	99.20%
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-	2,650,000	2,428,900	91,65%

	SKPD			
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,017,400	19,815,880	98.99%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,895,245,677	2,857,045,103	98.68%
	- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2,372,233,960	2,200,207,208	92,75%
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	24,960,000	24,302,000	97,36%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,985,000	1,969,900	99.24%
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22,243,800	21,526,972	96,77%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	28,980,000	24,965,000	86.15%
	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36,081,750	31,921,500	88.47%
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15,509,000	15,229,500	98.20%
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	77,250,000	57,790,000	74,80%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	513,663,750	502,707,619	97.87%
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,870,000	6,870,000	100%
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,997,500	2,790,000	93,08%
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,463,900	9,702,300	92,72%
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,000,600	19,987,090	95,17%
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11,500,000	10,985,000	95,52%
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	264,030,000	260,065,000	98,49%
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	356,809,000	350,898,040	98.34%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	570,450,000	559,550,000	98.09%
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81,500,000	80,500,000	99.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	476,943,220	420,298,296	88.12%
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28,255,375	25,370,650	89,79%

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,488,992	35,121,800	86,74%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207,000,000	207,000,000	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166,684,500	161,008,965	96.60%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53,080,000	38,227,104	72,01%
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,430,000	13,775,000	95,46%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14,000,000	13,995,000	99,96%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	10,000,000	9,992,500	99,92
PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9,587,400	7,624,630	79,52%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9,587,400	7,624,630	79,52%
- pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	9,587,400	7,624,630	79,52%

	Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	343,836,980	329,347,200	97,85%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	139,235,480	139,035,100	99.45%
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16,491,300	16,447,300	99,73%
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	122,744,180	122,587,800	99.87%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	175,672,900	170,339,900	96.96%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	204,601,500	190,312,100	93,01%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15,404,493	8,945,700	99,41%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12,596,000	12,517,170	99,37%
	- Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7,575,900	7,560,070	99.79%

	- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5,020,100	4,957,100	98,74%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2,999,445	2,979,200	99.33%
	- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2,808,493	2,808,340	99,99%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18,158,900	18,133,000	99.86%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18,158,900	18,133,000	99.86%
	- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34,217,900	34,191,910	99.86%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12,298,700	11,866,550	96.48%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	12,298,700	11,866,550	96,48%

	dan Pengawasan Pemerintah Daerah			
	-Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3,044,500	3,021,350	97.95%
	-Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9,254,200	8,845,200	95,58%
TOTAL BELANJA		4,100,691,250	3,852,584,544	93,95%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Nuha Tahun 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nuha Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan persentase capaian dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Nuha Tahun 2023 hanya 1 sasaran yang bisa digambarkan capaian kinerjanya yaitu sasaran 1 (satu) survei kepuasan masyarakat dengan realisasi baik 80.62 dari target 81.25. Sedangkan sasaran ke 2 (dua) yaitu Nilai LAKIP belum bisa digambarkan capaiannya disebabkan penilaian LAKIP untuk Tahun 2023 baru akan dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024. Pada tahun 2023 Kecamatan Nuha telah merealisasikan Anggaran Belanja Rp. 3,852,584,544 dari pagu anggaran sebesar 4,100,691,250 atau setara dengan 93,95% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Nuha telah optimal.

Pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Kecamatan Nuha meliputi :

1. Keterbatasan data. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP baik data internal maupun eksternal masih sangat terbatas.
2. Belum samanya pemahaman mengenai materi LAKIP bagi pelaksana kegiatan sehingga dalam penentuan Rencana Kinerja terutama penetapan indikator kinerja masing-masing kegiatan belum sesuai dengan defenisi yang diuraikan dalam Pedoman Penyusunan LAKIP (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas LKIP). Pada umumnya pelaksana kegiatan masih kesulitan dalam menentukan target indikator outcomes secara kuantitatif.

3. Pengembangan kelembagaan pada umumnya belum dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan hanya aktif pada masa-masa tertentu saja selama kegiatan itu berjalan (ada anggaran).

❖ Langkah Antisipatif :

1. Langkah-langkah antisipatif dalam upaya memecahkan masalah terutama lebih ditingkatkan koordinasi baik pada tingkat kabupaten maupun instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
2. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat.
3. Mengintensifkan koordinasi internal program dan kegiatan.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia melalui bimtek/diklat.
6. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.
7. Memaksimalkan kinerja dan pelayanan dengan sumber daya manusia yang terbatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait.

Nuha, Januari 2024



HARDI HAMID, S, STP
NIP. 19850710200602 1002

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- i. PERJANJIAN KINERJA
- ii. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU